

KONSERVATISME; Tantangan Islam Liberal di NU

Sebagai sebuah paham, konservatisme bukanlah terma yang asing bagi kita. Konservatisme merupakan “kacamata” yang disering digunakan orang atau kelompok yang mempertahankan nilai-nilai lama. Ada keengganan tersendiri bagi mereka untuk menyentuh nilai-nilai baru. Kendatipun demikian, kalangan konservatif tergolong ulet, karena bisa mengelaborasi pikiran-pikirannya dan kemudian membentuk komunitas yang fanatik, baik dalam masalah sosial-keagamaan maupun masalah keduniaan (politik, ekonomi dan budaya). Konsekuensi logisnya, konservatisme mendapat sambutan luar biasa di kalangan akar rumput, karena kesetiannya mereka pada “lahan kosong” masyarakat bawah, yang sering kali dilupakan dan diabaikan kalangan modernis.

Konservatisme berasal dari kata Latin *conservare* yang berarti ‘memelihara’, ‘menjaga’, ‘mempertahankan’. Dari makna etimologisnya kita bisa melihat bahwa pendukung berat konservatisme akan merasa lebih *enjoy* dengan pandangan-pandangan klasik dan sebaliknya; mereka cenderung menutup ventilasi ide-ide modernitas. Bagi mereka tidak ada pilihan

lain, kecuali mempertahankan pemahaman dan nilai-nilai lama. Maka, konservatisme adalah lawan modernisme dan liberalisme. Sebagai sebuah pandangan, konservatisme ingin mempertahankan struktur dan sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, moral atau keagamaan yang ada, dan melawan perubahan, terutama yang bersifat mendadak dan radikal.¹ Dalam hal ini, konservatisme sangat tidak sejalan dengan kalangan modernis, karena sangat kontra-produktif dengan ide-ide pembaruan.

Namun demikian, ada suatu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak sepenuhnya konservatisme berarti negatif, tapi juga bisa bernuansa positif. Konservatisme akan positif, bila mampu menyaring nilai lama yang positif dan membuang nilai lama yang negatif. Di sini pemeliharaan terhadap nilai lama dilandaskan pada objektivitas dan kebutuhan untuk mempertahankan nilai lama yang positif. Sebaliknya, konservatisme akan berefek negatif bila nilai-nilai lama dianggap *taken for granted*, tanpa ada proses telaah yang objektif.² Dalam kondisi demikian konservatisme sudah membabi-buta dan kehilangan kendali.

Maka dari itu, membedah konservatisme keagamaan NU sangat urgen untuk menge-

1 Mangunhardjana, *Isme-isme dari A sampai Z*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, halaman 130

2 *Ibid*, halaman 131

tahui karakteristik dan pernik-pernik pemikirannya. Yang kemudian diharapkan lahir beberapa antitesa dalam rangka melahirkan sintesa pemikiran yang mampu mewujudkan cita-cita *civil society*.

Konservatisme NU; Mempertahankan Nilai Lama via-Pesantren

Harus diakui, bahwa dari sekian banyak penelitian tentang NU, analisa terhadap konservatisme NU terbilang langka. Pendapat tersebut dibenarkan bila diselidik dari beberapa kajian yang muncul—dari dulu hingga sekarang—tentang ke-NU-an, baik oleh peneliti asing maupun peneliti lokal. Lebih-lebih setelah menetasnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NU kembali disorot sebagai perahu politik³ ketimbang NU sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai karakteristik tertentu dalam memahami wacana keislaman, baik dari aspek teologis, fikih maupun tasawuf. Kendatipun ada, kajian pemikiran keagamaan hanya pada ranah fikih yang dikenal dengan *bahs al-masâil*, sedangkan apresiasi yang lebih mendalam terhadap dinamika intelektualisme klasik yang lebih komprehensif terlihat kurang diperhatikan. Atau paling banter kajian pemikiran keagamaan hanya sebatas tema-tema parsial yang tidak kunjung selesai, seperti masalah *tablîl* dan *qunûl*, yang justru lebih menampakkan friksi dari pada

mencari jalan eklektisitas. Simplifikasi apresiasi semacam itu, sedikit banyak, telah menutupi kajian terhadap pemikiran-pemikiran lain yang patut dieksplanasi.

Melihat kelangkaan tersebut, paling tidak ada dua alasan mendasar terhadap miskinnya telaah konservatisme NU; *pertama*, secara internal dapat diamati kian menguatnya pandangan konservatif di kalangan NU, yang disebabkan hilangnya semangat dan keberanian mengkaji, mengkritisi dan merancang-ulang pemikiran klasik bagi kaum Nahdliyyin—sebutan akrab bagi warga NU—, yang dalam fase tertentu sampai pada tahap “pemberhalan”. Masih menjadi trend, bahwa pemahaman keagamaan di masyarakat tradisional sangat tergantung pada figur, tokoh dan simbol dari pada esensi pemikiran, sehingga akibatnya pemikiran keagamaan sama sejajar dengan agama itu sendiri yang tidak bisa diotak-atik oleh siapapun, kecuali bagi orang yang sudah mempunyai “status sosial” dan derajat keberagamaan. *Kedua*, secara eksternal dapat dilihat dari keterbatasan para peneliti dalam memahami sumber-sumber pemikiran keagamaan NU yang berbahasa Arab (baca: Kitab Kuning). Untuk memahaminya dibutuhkan pembelajaran yang kontinu terhadap bahasa Arab, bahkan perlu *nyantri* (masuk lembaga pesantren) selama bertahun-tahun. Dan apabila ingin

3 Kenyataan tersebut dibenarkan, jika melihat perubahan yang cukup mendasar setelah naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-empat. NU mau tidak mau harus berpolitik, bahkan harus siap menjadi “ajudan resmi” pemerintahan RI. Di sini sedikit banyak memberikan dampak pada lemahnya kajian-kajian kritis terhadap konservatisme, karena semakin dahsyatnya dinamika politik praktis NU belakangan ini.

lebih sempurna, tentu harus belajar di Timur-Tengah untuk memiliki cita rasa bahasa Arab (*dzauq al-lughab al-'arabiyah*), sebagaimana dilakukan para ulama klasik.

Tentu saja, kedua hal di atas menjelaskan bahwa pemikiran keagamaan di kalangan NU tidak banyak dijamah, sehingga dengan demikian masih berstatus "lajang", kendatipun belakangan ini ada beberapa intelektual NU yang mencoba mengapresiasi dan mengkritisi pemikiran klasik dalam komunitas NU sendiri, seperti Said Aqiel Siraj, Masdar F. Mas'udi dan beberapa intelektual muda. Maka dari itu, sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan realitas, deskripsi anatomi pemikiran klasik (konservatisme) di kalangan NU dianggap perlu untuk mengetahui pergolakan pemikiran beberapa tokoh NU yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat.

Untuk menjelaskan *prototype* konservatisme NU ada dua hal yang perlu diangkat ke permukaan: kitab kuning dan pesantren. Dua elemen tersebut cukup memberikan gambaran tentang dinamika konservatisme NU, kelemahan sekaligus keunggulannya.

Hal yang selalu menarik perhatian adalah fenomena masyarakat yang berbondong-bondong menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren yang *nota bene* mengajarkan kitab-kitab kuning, karena

pesantren telah terbukti membentuk pribadi-pribadi saleh dan tidak cepat terpengaruh dengan gaya hidup *westernized*. Martin Van Bruinessen menyebut pesantren sebagai *great tradition* (tradisi agung) Indonesia, yang tersebar di Jawa, luar Jawa dan Semenanjung Malaka.⁴ Dalam kondisi semacam ini, pesantren mempunyai nilai plus dalam hal pendidikan keagamaan, karena telah diakui menjadi benteng bagi dekadensi moral yang merebak bagi kalangan muda hingga saat ini.

Namun ada penilaian lebih jauh selain keistimewaan tersebut, bahwa pada saat yang sama, pesantren telah menjadi markas pemahaman keagamaan konservatif. Tradisionalisme yang berkembang di pesantren semakin terlembagakan dalam sebuah paradigma berpikir yang eksklusif.⁵ Buku-buku yang dijadikan rujukan tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan buku-buku klasik yang *out of date*. Lebih dari itu modernisasi pemikiran keagamaan di lingkungan pesantren ditolak mentah-mentah, dan tidak diberi kesempatan untuk bernafas. Maka dari itu, sulit mendapatkan pesantren yang mengajarkan sosiologi, antropologi dan beberapa teori modern lainnya. Mereka masih memegang kuat pemikiran-pemikiran klasik, seperti akidah 'Asy'ari, tasawuf al-Ghazali dan mazhab Syafi'ie. Ketiga hal tersebut sudah dianggap cukup untuk menata keber-

4 Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, Penerbit Mizan, Bandung, cetakan III, 1999, halaman 17

5 Bentuk perlindungan dan pertahanan terhadap tradisionalisme di pesantren sangat unik, bahkan pada tahap "ideologi" yang harus diterapkan secara otentik. Di sini bisa dilihat dari karakteristik pesantren yang tidak banyak mengalami perubahan berarti, baik dari segi kurikulum maupun sistem kepemimpinan. Yang menjadi ukuran pemimpin adalah heriditas dan geneologis, bukan kualitas.

agamaan masyarakat akar rumput. Upaya untuk mempertahankan tradisi dan pemikiran klasik sangat kental dalam lingkungan pesantren, buku-buku pegangan (*muqarrar*) yang digunakan pun tidak mengalami perubahan, baik bagi pesantren modern maupun pesantren salaf. Di sini, kemudian pesantren dianggap lembaga pendidikan keagamaan yang kaku.⁶

Ada beberapa ciri khas konservatisme NU yang terlembagakan di pesantren. *Pertama*, menentang rasionalisme. Sebagaimana disinggung di atas, pesantren bertujuan mencetak pribadi-pribadi saleh, bermoral tinggi dan religius, sehingga dalam batas-batas tertentu identitas 'santri' disandang bagi seseorang yang bisa membaca al-Quran, pakai sarung dan bisa berbahasa Arab. Sedangkan tradisi berpikir progresif dan kritisisme hampir tidak menjadi agenda, bahkan disingkirkan. Jika dilacak lebih detail, bahwa arus besar literatur-literatur keagamaan di pesantren berasal dari ulama klasik yang secara *alif wa lam al-'abd* menentang rasionalisme barat.⁷ Masih menjadi *mainstream* kalangan pesantren, bahwa filsafat dan beberapa cabang ilmu yang berafiliasi pada filsafat masih diharamkan, sehingga muncul kesan bahwa pesantren sangat anti-filsafat. Bahkan ada anggapan; bertanya, skeptis dan menyingkap aspek rasionalitas agama adalah salah satu ciri orang-orang kafir dan

kebiasaan setan. Di sini semakin jelas sisi konservatisme pesantren yang didukung dengan kitab-kitab klasik sebagai *platform* pemikiran konservatif. Kondisi tersebut juga didukung struktur pendidikan yang sentralistik. Kebijakan internal dipegang sepenuhnya oleh pimpinan atau pengasuh pesantren (baca: kiai) yang dalam beberapa hal tidak melalui proses dialog. Menurut Martin Van Bruinessen, bahwa hormat, takzim dan kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan kepada setiap santri.⁸ Tentu saja, paradigma anti-rasionalisme dan sistem kepemimpinan yang sentralistik akan menegasikan ekspresi, pendapat dan gagasan, serta proses kolaborasi dengan pemikiran-pemikiran "impor", sehingga implikasinya yaitu kecenderungan mempertahankan norma-norma lokal dan klasik. Keterbatasan literatur dan keterungkungan pada sistem paternalistik telah mereduksi tradisi ilmiah dan tradisi kritik. Di sini, pesantren terlihat *at home* dengan tradisi lama dan mengabaikan modernisasi yang dilahirkan melalui rasionalisasi.

Kedua, menolak ijtihad. Salah satu bahasan yang menjadi perhatian kalangan pesantren yaitu fikih. Pesantren telah memperkenalkan kepada masyarakat urgensi fikih dalam melaksanakan ibadah ritual sehari-hari, sehingga dengan cepat dapat dikonsumsi oleh kalangan akar

6 Loc.cit, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*.

7 Dalam hal ini bisa melihat beberapa buku, di antaranya *Ihyâ' ulûm al-dîn*, *Ta'lim al-muta'allim* dan beberapa buku lainnya, yang sangat menentang rasionalisme. Yang lebih ditekankan adalah sisi moralitas, etika dan sopan-santun, sedangkan tradisi ilmiah *malah* diterlantarkan.

8 Loc.Cit, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, halaman 18.

rumpun. Ketergantungan dan kebutuhan terhadap fikih semakin mendesak, ketika dalam menghayati esensi keberagaman harus melalui jalur fikih, sehingga kemudian pola keberagaman kalangan NU disebut *fiqh oriented*. Secara otentik, kecenderungan besar pada fikih bisa dilihat dari *bahts al-masâil* yang dilakukan ulama NU, dari level ranting, sampai pada level pusat. Namun pada fase selanjutnya ada fenomena yang patut dicermati: macetnya ijtihad-ijtihad kontemporer.

Tradisi fikih yang mencerminkan pro-kontra, debat dan perbedaan, kemudian dibatasi pada empat mazhab; Imam Syafi'ie, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Dalam menentukan sebuah hukum harus berlandaskan pada buku-buku utama (*al-kutub al-mu'tabarah*) yang telah diseleksi dan disepakati para ulama. Di sini kemudian ijtihad menjadi "gersang", milik kelompok dan bukan milik individu, sehingga secara otomatis ijtihad terkesan berjalan di tempat, karena ijtihad harus melalui jalur-jalur formal.

Kondisi semacam ini sudah menjadi *trade mark* fikih umat Islam secara umum, yang berakibat pada macetnya aktivitas fikih. Padahal dalam Islam ada penghargaan khusus bagi seorang yang melakukan ijtihad (*mujtahid*). Ulama-ulama NU dan kalangan akademisi pesantren sangat kuat dalam mempertahankan fikih lama. Kendatipun selama ini ada upaya ijtihad dari beberapa ulama NU, namun tidak bisa dipungkiri bahwa arus besar fikih di kalangan NU masih konservatif. Rona-rona pembaruan fikih yang mengarah pada eklektisisme dan merambah jalan ketiga (*the third way*) dalam fikih seringkali mengalami

resistensi dan marjinalisasi. Jelas, bahwa fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelembagaan fikih, padahal *grand father* fikih, Imam Syafi'ie, mengajarkan pembaruan dalam ranah fikih melalui *fiqh qadîm* (fikih lama) dan *fiqh jadîd* (fikih baru). Penolakan terhadap ijtihad-ijtihad baru bisa juga disebabkan oleh sempitnya ruang ijtihad yang hanya terbatas pada wilayah impersonal-kolektif, bukan wilayah personal. Maka dari itu, konservatisme NU dalam fikih sangat kentara.

Ketiga, akomodasi terhadap tradisi (*turâts*). Bagi masyarakat tradisional, tradisi merupakan ukuran dalam menentukan pandangan dan sikap, bahkan tradisi bisa mengalahkan ukuran-ukuran pembenaran yang lain. Dalam hal ini, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang gigih mempertahankan tradisi lama tersebut. Ada adagium yang selalu disebut-disebut sebagai "manifesto" yaitu mempertahankan tradisi yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik (*al-mubâfazah 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîd al-ashlah*). Walaupun ada nuansa menatap ke depan dalam adagium tersebut, tapi ada kecenderungan untuk "mengakomodasi tradisi". Di sini kalangan konservatif NU mempunyai keyakinan tersendiri untuk tidak beranjak dari tradisi. Meminjam pemetaan akomodasi terhadap tradisi ala Abed al-Jâbiriy, biasanya kalangan konservatif menggunakan dua model; pemahaman klasik terhadap tradisi (*al-fhm al-turâtsy 'alâ al-turâts*) dan pemahaman klasik terhadap modernitas (*al-fahm al-turâtsy 'alâ al-hadâtsbah*).

Ketiga karakteristik tersebut tumbuh subur, "berkembang-biak" dan beranak-pinak di kalangan pesantren. Namun perlu

diketahui, bahwa hal di atas bukan hanya menjadi fenomena khas NU, namun sudah menjadi *trade mark* konservatisme di dunia Islam lainnya, seperti Saudi Arabia, Mesir, Aljazair, Suriah, Kuwait dan beberapa negara lainnya. Dan jika dilacak pada akar-akarnya, ternyata ada benang yang menyambungkan antara konservatisme di Indonesia dan Timur-Tengah. mengenai proses transmisi ilmu-ilmu agama yang bersumber dari *al-Haramain* (Makkah dan Madinah) Martin menulis:

Hampir semua pengarang-pengarang Islam Indonesia menghabiskan banyak waktunya di Makkah dan, Madinah dan pusat-pusat pengajaran Islam di Timur-Tengah. Namun bukan hanya para ulama, tetapi juga para penguasa Islam masa lalu merujuk ke Makkah untuk kekuatan spiritual. Pada tahun 1630-an, Abu'l-Mafakhir Mahmud, raja Banten keempat, mengirim utusan ke Makkah untuk minta pengakuan sebagai Sultan serta penjelasan berbagai kitab agama dan bahkan meminta kedatangan ahli fikih dari Makkah untuk memberikan pengajaran agama di Banten. Pada tahun 1694, raja mataram juga minta dianugerahi gelar "sultan" dari penguasa (syarif) di Makkah, sebagai salah satu untuk memperkuat kembali legitimasi

*keagamaannya.*⁹

Di sini, secara geneologis pendapat tersebut semakin memperkuat bahwa konservatisme pesantren di Indonesia yang mayoritas *NU oriented* merupakan hasil "adonan" beberapa sumber keagamaan, baik itu Arab maupun India. Jaringan intelektualisme Indonesia dan Timur-Tengah kian marak pada abad 19 dan 20, ketika jumlah orang-orang Indonesia yang menunaikan haji semakin bertambah, sehingga sebagian mereka memilih untuk menetap di Makkah dalam rangka memperdalam ilmu-ilmu agama.¹⁰ Maka dari itu, dalam hal tertentu corak konservatisme NU mempunyai kemiripan dengan konservatisme Wahabi yang terkesan radikal, namun pada sisi lain ada proses akulturasi dengan budaya.

Makkah adalah kiblat pendidikan Islam yang dianggap *genuine* dan steril dari westernisasi. Islam *par-excellent* menurut kalangan konservatif adalah Islam yang datang dari *al-Haramain* (Makkah dan Madinah). Sedangkan Mesir yang di dalamnya terdapat Universitas al-Azhar, universitas Islam tertua di dunia, pada abad

9 *Ibid*, halaman 22

10 Untuk memperjelaskan keotentikan jaringan ulama Indonesia dengan Timur-Tengah bisa membaca karya Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Martin Van Bruinessen. Martin menjelaskan, bahwa ada beberapa ulama yang mengajar di masjid al-Haramain, seperti Nawawi al-Bantani, Ahmad Khatib dan Mahfudz Termas.

19 kurang diminati, karena merosotnya status Mesir yang terbaratkan (*westernized*).¹¹ Maka dari itu, akar-akar konservatisme NU bisa dilacak dari arus transmisi pemikiran keagamaan yang diimpor dari al-Haramain.

Konservatisme NU vis a vis Pemikiran Liberal

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa “sasaran tembak” kalangan konservatif adalah kelompok liberal. Perdebatan antara kedua kubu tidak akan pernah tuntas. Ibarat sebuah pertandingan, bola akan terus bergulir di lapangan hijau tanpa gawang. Keduanya saling menyerang. Tipe bertahan bagi mereka sangatlah tidak menguntungkan.

Salah satu istilah yang lazim digunakan kalangan konservatif untuk menohok kalangan liberal yaitu *bid'ah*. KH. Hasyim Asy'ari, *founding father* NU menulis dalam *Risalah Ablussunnah wal Jamâ'ah* pada fasal pertama yaitu *Fasal tentang Sunnah dan Bid'ah*. Betapa sejak awal ada persoalan serius antara Sunnah dan Bid'ah. Keduanya diposisikan secara berlawanan, yang satu benar dan satu lagi salah atau yang satu harus diambil dan yang lain harus

dijauhi. Beliau menulis:

Menurut Syara', Sunnah adalah sebutan bagi jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktekkan Rasulullah Saw. atau tokoh agama lainnya, seperti para sahabat, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw.. Kalian harus berpegang pada tradisiku dan tradisi para penggantiku. Menurut kebiasaan, Sunnah adalah sesuatu yang dipraktekkan secara kontinyu oleh sosok yang menjadi panutan, baik seorang Nabi maupun wali.

*Bid'ah adalah munculnya perkara baru dalam agama yang kemudian mirip bagian agama, padahal bukan bagian darinya, baik formal maupun hakikatnya. Nabi Saw. Bersabda, Barang siapa memunculkan perkara baru dalam urusan kami (agama) yang tidak merupakan bagian dari agama itu, maka perkara tersebut tertolak. Dalam hadis lain disebutkan, Setiap perkara baru adalah bid'ah.*¹²

Secara implisit, pendapat tersebut menjelaskan bahwa sejak dahulu kala telah tumbuh kelompok-kelompok pembaru yang senantiasa melakukan pembaruan pemikiran, khususnya sebelum NU berdiri, bahkan jauh sejak fase awal Islam. Maka dari itu, *platform* yang ditulis KH. Hasyim merupakan pembacaan baru terhadap terminologi *bid'ah* yang berkembang pada

11 Loc.cit, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, halaman 35. Kesan tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahwa lulusan Universitas al-Azhar di Mesir setelah pulang ke tanah air tidak se-wara' lulusan Universitas Umm al-Qurâ (Makkah) dan Universitas Malik bin Abd al-Aziz (Madinah). Dari segi penampilan pun sudah bisa dibaca, bahwa lulusan al-Azhar lebih liberal dari pada lulusan Makkah dan Madinah. Hal ini dipengaruhi sosial-budaya Mesir yang terbuka pada peradaban lain, selain masyarakat lebih plural jika dibandingkan Makkah dan Madinah. Namun kedua-duanya masih menjadi rujukan keagamaan di Indonesia, baik jebolan Mesir maupun al-Haramain mempunyai peran yang signifikan dalam pendidikan Islam, dari level pesantren hingga perguruan tinggi Islam di IAIN seluruh Indonesia.

12 Asy'ari, Hasyim, *Ablussunnah wal Jamâ'ah*, LKPSM, Yogyakarta, 1999, halaman 2

saat itu.

Dalam menjelaskan macam-macam bid'ah, beliau menggunakan pemetaan Ibnu Abd. Salam, bahwa ada enam macam bid'ah; bid'ah wajib,¹³ bid'ah haram,¹⁴ bid'ah mandub,¹⁵ bid'ah makruh,¹⁶ bid'ah mubah.¹⁷ Kemudian beliau mengakhiri fasal satu dengan tulisan berikut:

bahwa memakai tasbih, melafazkan niat, tablilan untuk mayit dan ziarah kubuh, bukanlah bid'ah. Sebenarnya bid'ah yang kotor, yaitu seperti menarik pungutan di pasar-pasar malam, main dadu dan lain-lain.¹⁸

Dalam hal itu, tentu saja beliau fleksibel dan kontekstual dalam menentukan bid'ah terhadap hal-hal baru dalam pola keberagaman. Namun demikian, secara eksplisit ada nuansa yang perlu diangkat ke permukaan bahwa manifestasi konservatismenya terlihat ketika mencap *bid'ah haram* beberapa aliran, seperti aliran *Qadariah*, *Jabariah* dan *Mujassamah*. Pendapat semacam ini terkesan politis dan tidak objektif. Padahal aliran-aliran tersebut juga lahir dari kultur Islam dan merupakan salah satu khazanah Islam. Di sini KH. Hasyim Asy'ari terjebak pada klaim kebenaran (*truth claim*) dan pemahaman dominatif. Dikhotomi *Sunnah* dan *Bid'ah* telah menginspirasi dominasi *Sunnah* terhadap *Bid'ah*. Pemahaman

semacam ini mempunyai dampak serius bagi tumbuhnya pemikiran baru di tubuh NU, khususnya yang datang dari Barat. Pemikiran baru dengan gampang dianggap bid'ah. Dalam persoalan tahlil dan ziarah kubur, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sangat brilian, tapi dalam pembaruan pemikiran yang lebih menggunakan akal dan rasio dapat digunakan justifikasi menolak trend modernisasi dan post-tradisionalisme Islam.

Dalam pendapat yang serupa, KH. Syukran Makmun mengomentari bid'ah— meminjam pendapat Imam Syafi'i— bahwa bid'ah terbagi dua; *bid'ah hasanah* yaitu bid'ah yang sesuai dengan Sunnah dan *bid'ah sayyiah* yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah.¹⁹ Jika dipahami lagi, sebenarnya inti dari pendapat tersebut yaitu *Sunnah vis a vis Bid'ah*. Klasifikasi semacam ini tentu saja memberikan kesan eksklusivitas dalam ranah keberagaman, di mana agama harus mengikuti lalu-lintas Sunnah dan menutup bagi lahirnya pembaruan-pembaruan pemahaman yang lahir dari realitas sosial dan epistemologi modern. Maka dari sini, dibenarkan jika konservatisme sangat hati-hati dan “mencurigai” gerakan-gerakan rasionalisasi pemikiran keagamaan, yang kadangkala sampai pada

13 Bid'ah wajib seperti belajar ilmu nahwu dan kata-kata asing dalam al-Quran dan Sunnah.

14 Bid'ah haram seperti aliran Qadariah, Jabariah dan Mujassamah.

15 Bid'ah *mandub* seperti membangun bangunan, sekolah dan segala kebajikan yang tidak dikenal pada masa awal.

16 Bid'ah *makruh* seperti menghias masjid dan mushaf.

17 Bid'ah *mubah* seperti berjabat tangan setelah shalat subuh dan asar, bersenang-senang dalam makan, minum, berpakaian dan lain-lain.

18 *Loc.cit*, halaman 7.

19 Makmun, KH. Syukran, *Risalah Pemantapan Ahlussunnah wal Jamaah*, Jakarta, 1988, halaman 32.

tahap pengkafiran.

Doktrin Sunnah merupakan salah satu cara untuk “menjatuhkan” bid’ah. Konsekuensinya pemikiran liberal akan mendapatkan kendala, karena komunitas yang ada hanya percaya pada hal-hal yang mempunyai “garis struktural” pada Sunnah belaka, sedangkan selain itu dianggap bid’ah.

Menguatnya arus komunalisme dalam konservatisme NU juga menarik diamati. Sejak awal sudah mempunyai komitmen dan keinginan kuat untuk menjadikan NU sebagai gerakan komunal yang bersifat massif. Doktrin yang dikembangkan pun digiring pada satu arah pemahaman, bukan memahami pluralisme pemikiran. Di sini, betapa jama’ah menjadi doktrin yang sangat penting,²⁰ sehingga diwajibkan memilih satu jalan, yaitu *salaf al-shâleh*. KH. Hasyim Asy’ari menulis:

Dengan demikian mengikatkan pada mazhab tertentu lebih dapat menyatukan kebenaran, lebih mendekatkan untuk merenungkan, lebih mengarah pada ketelitian, dan lebih mudah dijangkau. Inilah yang dilakukan oleh para salaf al-shâleh dan guru-guru yang telah lewat.²¹

Implikasi dari hal tersebut, yang

berkembang yaitu doktrin keharusan bertaklid bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad.²² Ruang ijtihad kemudian menjadi sempit, yang dapat dilakukan hanya oleh kalangan-kalangan tertentu. Muncul kesan, “lebih baik bertaklid pada mazhab tertentu dari pada salah dalam berijtihad.” Doktrin ini telah mereduksi ijtihad, sehingga di kemudian hari ijtihad menjadi *stereotype* dan bermakna pejoratif. Yang bisa dilakukan *paling* hanya ijtihad secara kolektif, yang dikenal dengan *habs al-masâil*, sedangkan ijtihad secara personal kurang populer. Toh walaupun ijtihad dianjurkan, tapi harus memenuhi beberapa syarat, seperti menguasai bahasa Arab (nahwu, sharaf dan balaghahnya), menguasai dan memahami al-Quran, menguasai Hadis dan lain-lain.²³ Pembatasan ijtihad bagi orang-orang yang memenuhi syarat tersebut bisa ditafsirkan, bahwa ijtihad sangat tergantung kepada al-Quran dan Sunnah, sedangkan sisi rasionalitasnya dikesampingkan. Maka bila tidak memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tersebut lebih baik bertaklid.

Di sini, tentu saja terdapat perbedaan yang cukup kentara antara kalangan konservatif yang memberikan legalitas

20 Untuk melihat komunalisme lebih jelas lagi, ada beberapa hadis yang digunakan; Rasulullah Saw bersabda, *Barangsiapa menyendiri, maka ia akan menyendiri ke neraka, hendaklah mereka senantiasa bersama kelompok yang berada di jalan salaf al-shâlihîn*. Rasulullah Saw bersabda, *Sesungguhnya kami memerintahkan kepada lima perkara yang Allah perintahkan kepadaku yaitu patuh, taat, jihad, hijrah dan jama’ah. Orang yang keluar dari jamaah sejenkal saja, berarti ia telah mencabut seikat tali Islam dari lehernya.*

21 Loc. Cit, *Risâlah Ahlussunnah wal Jamâ’ah*, halaman 16-17.

22 Ibid. Dalam rangka membenarkan doktrin tersebut, kalangan konservatif mendasarkan pada ayat, *Maka, bertanyalah kepada orang yang berpengatahuan jika kamu tidak mengetahui* (QS. Al-Nahl [16]: 43).

23 Loc.cit, *Risâlah Pemantapan Ahlussunnah wal Jamâ’ah*, halaman 29-30.

taklid dan kalangan liberal yang sangat menekankan pada ijhtihad-ijhtihad baru, baik secara personal maupun impersonal. Sebenarnya pemikiran ini tak lepas dari elan komunalisme NU dengan legalitas taklidnya.

Dalam komunitas internal NU juga ada doktrin “Ahlussunnah wal Jamâ’ah” sebagai kelompok yang selamat dari 73 kelompok besar.²³ Tidak berbeda dari doktrin-doktrin yang sebelumnya, bahwa dalam doktrin tersebut ada kesan justifikasi terhadap salah satu golongan. Yang tidak sejalur dengan Aswaja dianggap *kafir, fasiq dan zindiq*. Padahal merupakan *sunnatullah* terdapat aneka ragam jalan menuju Tuhan yang menjabarkan adanya pluralitas dalam kehidupan dan keberagaman.²⁴ Pada perkembangan selanjutnya, Aswaja menjadi kaku dan tidak bisa dikritisi. Di sini kalangan konservatif NU mengalami persoalan serius: pemurnian terhadap Aswaja dan mengabaikan tuntutan kekinian, sehingga seakan-akan ada satu kebenaran dan mengenyampingkan pendapat-pendapat lain. Kecenderungan serupa juga dianut oleh kalangan konservatif di Mesir yang berada di barisan al-Azhar. Buku-buku Tauhid yang diajarkan kepada mahasiswa cenderung memenangkan

kalangan Aswaja dan mengkafirkan kelompok lain, seperti Mu’tazilah, filsuf dan kubu rasionalis lainnya. Gus Muhammad Najih Maimun menulis:

Kita Ahlussunnah ada yang beraliran (mazhab) Ayy’ari dan ada yang mengikuti aliran Maturidi cuma sebatas melawan Mu’tazilah. Jadi umat Islam harus menggali akidah dari al-Quran dan Hadis di samping memperhatikan keterangan-keterangan ulama yang ahli dalam bidang akidah (pengikut Ayy’ari, Maturidi dan Ahli hadis).²⁵

Doktrin Aswaja merupakan khazanah yang senantiasa digunakan kalangan konservatif untuk menohok kubu rasionalis dan modernis. Apabila dulu Aswaja digunakan untuk melawan Mu’tazilah, sekarang digunakan untuk melawan kalangan liberal. Akibatnya Aswaja menjadi “ajaran suci” yang tidak bisa disentuh dan dikritisi. Di sini kemudian Aswaja kehilangan nuansa sosial dan humanismenya. Bahasan-bahasannya tidak lagi memihak pada manusia, tapi memihak pada “nilai-nilai langit”. Aswaja yang semula dibuat terikat dengan *setting* sosial tertentu dan tuntutan masa pada waktu itu, kemudian menjadi “pegangan abadi”-yang harus dilaksanakan, tanpa mengenal masa dan

23 *Ibid*, halaman 27

24 Hadis satu kelompok yang selamat yaitu *Ahlussunnah wal Jamâ’ah* mulai mendapat reaksi kritik dari beberapa intelektual NU, seperti Said Aqied Siraj, Masdar F. Mas’udi dan beberapa intelektual muda. Beberapa intelektual Arab, seperti Hassan Hanafi dan Yusuf Qardlawi juga melakukan kritik yang sama, karena hadis tersebut tidak selaras dengan realitas masyarakat yang majemuk dan plural. Atau menurut Dr. Muhammad Imarah, bahwa pluralisme adalah *sunnatullah* yang berproses menuju keesaan.

25 Lihat hasil wawancara tertulis redaktur *Jurnah Tashwirul Afkar*, LAKPESDAM-NU dengan Gus Najih.

26 *Ibid*. Argumentasinya didasarkan pada beberapa ayat al-Quran yang melarang kaum Yahudi dan Kristiani untuk diangkat menjadi pemimpin atau penguasa (QS al-Mâidah [5]: 51, QS Ali Imrâm [3]: 19,

tempat. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, tentu saja terjadi "urbanisasi" konservatisme, yang semula bercokol di pedesaan, tiba-tiba dapat dikomsumsi di kota-kota besar. Di kota inilah kemudian lahir perdebatan menarik antara kalangan konservatif NU dan Liberal NU.

Begitu halnya dengan keengganan konservatisme NU untuk menggunakan pendekatan modern, juga melahirkan pemahaman keagamaan fundamentalistik dan keras. Ada beberapa contoh pendapat kalangan konservatif terhadap persoalan kontemporer. *Pertama*, hak umat Islam dan Kristen dalam sebuah negara. Gus Muhammad Najih Maimun dalam masalah ini cenderung mempertahankan pemikiran klasik, bahwa orang-orang Kristen boleh-boleh saja hidup berdampingan dengan mayoritas umat Islam dalam sebuah negara. Namun menurutnya, kelompok kristiani tidak boleh memiliki kekuasaan di atas umat Islam sekecil apapun.²⁶ Pendapat tersebut masih berpedoman pada konsep *ahl al-dzimmah* yang cenderung membedakan kedudukan Islam dan Kristen. Lebih radikal lagi, ketika beliau mengomentari konflik agama di Ambon dan Maluku, beliau mewajibkan jihad, karena umat Islam sudah diserang oleh non-muslim.

Dalam hal ini terlihat jalan pintas yang diambil sangat simplisistik yaitu jihad. Persetujuan antar Islam dan Kristen selalu dikait-kaitkan dengan sejarah masa lalu²⁷ dan melupakan pemicu konflik yang sebenarnya. Maka dari salah satu kelemahan kalangan konservatif yaitu senantiasa mengembalikan persoalan kekinian para persoalan klasik. Padahal setiap persoalan mempunyai latar belakang yang berbeda, meskipun di dalamnya terdapat unsur kesamaan.

Kedua, persoalan gender dan kepemimpinan wanita. Dalam hal ini, kalangan konservatif NU memberikan respon keras, bahkan pada pemilu 1999 kemarin telah digelar kongres umat Islam yang sengaja dilaksanakan untuk menolak kepemimpinan wanita. Dalam menanggapi Isu-isu gender yang merebak, Gus Najih Maimun mengomentari:

Gagasan gender adalah bentuk dari upaya memasarkan memasarkan kekefuran serta bentuk-bentuk dari gerakan Zionis Yahudi, komunisme yang berdampak hilangnya ghirah yang telah ditanamkan Rasul kepada para Sahabat dan seluruh umat yang taat dan bertujuan melecehkan kaum hawa dengan mengeksploitasi keindahan fisik mereka demi kepentingan-kepentingan ekonomis dan biologis.²⁸

28, 85).

27 *Ibid.* Menurutnya, dari dulu orang-orang barat (Kristen) memang ingin menguasai semenanjung Arab, namun Allah melindungi Ka'bah-Nya dari serbuan tentara gajah yang dikirim Pemerintah Nasrani yang bercokol di Yaman di bawah pimpinan raja Habsyah.

28 *Ibid.* pendapat tersebut diperkuat oleh ayat-ayat al-Quran; (QS al-Nûr :30, al-Nisâ': 34) dan hadis Nabi. Selain itu juga didasarkan pada pendapat beberapa ulama, seperti Syaikh Abdul Wahâb al-Sya'râni, Wahbah Zuhayli, dan pengarang buku *Rahmat al-Ummah*.

29 Tulisan KH. Najih Maimun, tentang "Kepemimpinan seorang Wanita". Dalam buku tersebut beliau

Pandangan keras terhadap gender merupakan agenda terbesar kalangan konservatif NU, bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin/presiden. Sebab syarat seorang pemimpin yaitu beragama Islam dan laki-laki. Kenapa laki-laki? Mereka mengacu pada sebuah Hadis yang berbunyi, "Tidak akan sejahtera suatu kaum jika dipimpin seorang wanita" (HR. Bukhari). Selain itu, karena wanita tidak mempunyai kecerdasan sebagaimana laki-laki, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pemimpin.²⁹ Dampak dari pandangan tersebut, kajian gender hilang dari peredaran. Gerak dan ruang lingkup wanita sangat terbatas.

Implikasi yang lebih jauh, isu kepemimpinan wanita sempat menjadi tajuk dan tema pembicaraan nasional. Begitu besarnya pengaruh pendapat mereka ini pada tataran akar rumput, sehingga isu gender menjadi isu agama dan isu politik³⁰ pada saat bersamaan. Adanya penolakan keras terhadap Megawati sebagai calon presiden, karena beliau wanita, selain beberapa pendapat lain yang sangat politis dan menduga-duga.

Dalam rangka wacana, perdebatan tersebut menarik, tapi sebaliknya, sangat tidak menarik, ketika alasan-alasan dan fungsionalisasi gagasan tersebut sangat bias, baik bias maskulinisme kitab kuning yang sebagian besar ditulis laki-laki atau bias politik. Akibatnya isu gender kehilangan

dinamikanya, karena hanya berkuat pada tataran teks. Maka dari itu, muncul respon kritis dari beberapa intelektual NU, seperti Masdar F. Mas'udi, KH. Husein Muhammad dan Ibu Shinta Nuriyah terhadap pandangan kalangan konservatif, dan mengambil alih isu sentral penindasan terhadap wanita sebagai persoalan kontemporer yang harus diperhatikan dengan melakukan pembacaan kritis terhadap wacana keagamaan klasik.

Memotret model pemahaman—yang digunakan kalangan konservatif NU—di atas, sedikit banyak akan menghambat gerakan Islam Liberal di NU yang mulai berkecambah akhir-akhir ini. Pribumisasi dan modernisasi pemikiran keislaman, seperti yang dikehendaki Gus Dur dan beberapa tokoh Islam Liberal lainnya akan mendapat hambatan serius dari dalam NU sendiri, karena pikiran-pikiran konservatif masih membahana dan mengakar kuat di masyarakat bawah. Kalangan konservatif (kiai-kiai) di wilayah dan daerah masih bersikukuh dengan pandangan-pandangan klasik. Padahal mereka adalah kelompok garda depan yang paling akrab dengan masyarakat bawah. Jika fenomena tersebut tidak dicermati secara jeli, maka akan terjadi "perang saudara" dan akibatnya konstruksi Islam Liberal akan "retak".

Maka kalangan Liberal perlu melakukan perhatian serius terhadap fenomena tersebut. Logikanya, apabila kalangan

mengancam Gus Dur yang punya pikiran-pikiran liberal.

30 Lihat beberapa tulisan KH. Najih Maimun, yang secara terang-terangan menilai Megawati tidak layak menjadi presiden, karena dia wanita dan menghadiri beberapa ibadah ritual Hindu.

konservatif mampu melakukan “urbanisasi” pikiran-pikiran konservatif, maka sudah saatnya pemikiran-pemikiran Liberal “turun ke bawah” agar lebih mengakar di kalangan akar rumput. Tentu saja, hal tersebut terkait dengan *strategi* dan *intensifitas* guna mendialogkan pemikiran-pemikiran baru hingga pada level yang paling bawah. Menurut penulis, agenda utama yang harus dilakukan yaitu memberdayakan pesantren lewat wacana-wacana baru yang berkembang di dunia Islam lainnya, seperti India, Arab dan Barat sekalipun. Lebih-lebih diperlukan studi kritis terhadap khazanah klasik yang dianggap final dan *qath’ie* oleh sebagian ulama NU. Dalam melakukan misi tersebut, sumber daya NU mencukupi, melihat arus baru gerakan santri yang belakangan ini tekun melakukan studi komparatif-kritis terhadap tradisi dan modernitas, baik yang bersumber dari literatur Arab modern maupun literatur sekuler yang berkembang di Barat. Studi kritis terhadap Aswaja pun mulai bermunculan dalam rangka mewujudkan wajah Islam baru yaitu Islam Liberal.

Mencari Ruang Dialog Konstruktif

Sebagai kecenderungan mayoritas, Konservatisme NU akan terus berlaga di medan pergulatan, sehingga perdebatan tadi tidak akan redup, sewaktu-waktu akan mencuat ke permukaan. Pada saat yang sama, kalangan liberal tiak akan bosan melakukan pembacaan baru (*qir’ah jadidah*) terhadap wacana keagamaan yang berkembang di tubuh NU. Maka mengacu pada model konservatisme positif, sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan perdebatan

rasional-ilmiah yang jauh dari emosi dan keberpihakan pada golongan tertentu. Yang dimaksud dengan konservatisme positif yaitu konservatisme yang “sadar konteks”, di mana perlu diadakan kompromi-kompromi terhadap tuntutan zaman. Hal tersebut mendesak dilakukan di saat gejala polarisasi semakin kentara, sebagai konsekuensi dari pluralitas tipologi pemikiran keagamaan di NU. Pada satu sisi pluralitas tipologi tersebut menandakan khazanah NU yang majemuk, namun di sisi lain akan berdampak negatif, bila yang terjadi kemudian kecenderungan menutup diri dan menutup koridor-koridor dialog konstruktif.

Adalah khazanah dan nilai murni Islam yang hampir dilupakan oleh kalangan NU dalam menyikapi polarisasi pemikiran keagamaan yaitu dialog. Tradisi dialog dan debat dirasakan masih jarang, baik antara santri dan kiai atau antara kiai dan kiai. Di sini, penulis melihat perlunya menghidupkan kembali tradisi dialog ilmiah, sehingga perbedaan pendapat tidak terkesan *monolog*.

Ada beberapa agenda besar yang harus dilakukan untuk membangun tradisi baru di NU. *Pertama*, memperluas dialog keagamaan pada tema-tema kontemporer. Selama ini, dialog keagamaan hanya pada aras fikih, maka di masa-masa mendatang perlu diperluas pada tema-tema kontemporer, seperti demokrasi, HAM dan gender, atau tema lain yang lebih menantang. Tema-tema tersebut sampai detik ini di sebagian besar pesantren NU masih dianggap tabu. Ini merupakan agenda yang harus dipikirkan bersama-sama untuk membangun kesadaran terhadap fenomena

kontemporer. Kelemahan kalangan konservatisme di mana pun terkesan sangat normatif, tekstual dan mengabaikan realitas sosial.

Kedua, membangun basis rasionalisme, ijtihad dan dialog-ilmiah di tengah-tengah komunitas NU. Di mana di kalangan pesantren mengharamkan filsafat masih menjadi trend. oleh sebab itu pesantren perlu melakukan evaluasi terhadap pandangan tersebut. Karena kemajuan sebuah komunitas masyarakat juga harus didukung basis filsafat, sebagai mana masyarakat Perancis modern yang kaya-raya dengan gagasan-gagasan filsafatnya.

Ketiga, mentradisikan dialog konstruktif. Kubu konservatif dan kubu liberal sudah

semestinya duduk bersama, mendialogkan beberapa persoalan yang di perdebatkan para intelektual NU secara dingin dan tidak menggunakan klaim kebenaran yang diikuti dengan gerakan massif. Hal ini penting dalam mengeleminir pembusukan intelektual yang sering menggunakan senjata massif-irrasional.

Dengan demikian, konservatisme NU akan menjadi khazanah baru yang akan mewujudkan dinamika baru intelektualisme NU. Pada saatnya pula NU akan melahirkan kampiun-kampiun pemikiran keagamaan yang diperhitungkan. Tentu saja setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan.

❖ *(Zubairi Misrawi)*